

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2014



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya pembuatan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Dengan berakhirnya Program dan Kegiatan tahun anggaran 2014 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan Penetapan Kinerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2014, termasuk pengukuran Kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya BPKAD Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, 27 Pebruari 2015

KEPALA BPKAD KOTA BALIKPAPAN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. ASPEK STRATEGIS.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
PERENCANA KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	23
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.	26
B. SARAN.	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. PENETAPAN KINERJA 2015	
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014	
3. STRUKTUR ORGANISASI	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 menyajikan uraian tentang pencapaian kinerja. Dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja BPKAD Tahun 2014 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, strategi, kebijakan, program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menyadari hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang disertai wewenang untuk pembinaan dan pelayanan pada SKPD di Kota Balikpapan, untuk melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu pertanggung jawaban akuntabilitas.

Adapun sasarannya yaitu :

1. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD.
2. Meningkatnya administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan
3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan.
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan adanya laporan LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Salah Satu Langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, yang harus menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah melakukan pencermatan lingkungan Internal dan eksternal, maka aspek strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dengan kemampuan sumber daya manusia maka akan dapat didayagunakan untuk menggali potensi yang ada
- b. Dengan sumber daya manusia yang handal akan dapat didayagunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi
- c. Dengan kemampuan dan kewenangan sumber daya manusia serta dukungan pendanaan yang memadai maka dapat melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Balikpapan.

- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia merupakan kebutuhan untuk menggali potensi dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembinaan kepada SKPD, merupakan persyaratan pencapaian tugas dan fungsi organisasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Balikpapan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 08 september 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
 2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 1. Sub Bidang Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Kas Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi:

1. Sub Bidang Akuntansi;
2. Sub Bidang Pelaporan;
- f. Bidang Analisa Kebutuhan Aset membawahi :
 1. Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset;
 2. Sub Bidang Pengamanan Aset;
- g. Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset membawahi :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis kinerja tahun 2014 atau dokumen yang dipersamakan dengan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dijabarkan dalam rencana kerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kerja yang dimaksud menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Rencana kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat informasi mengenai visi misi, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Selain itu dokumen Rencana Kerja Tahunan juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014, yang selanjutnya telah dibreakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 tidak terlepas dari visi misi Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah

Kota Balikpapan yaitu : “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL”

Kata kunci dari visi Badan Pengelola Keuangan dan Aseta daerah Kota Balikpapan adalah bagaimana agar profesionalisme di dalam mengelola keuangan dan aset daerah dapat terwujud, artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dikelola oleh aparat yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya. Ini semua diharapkan dapat menyokong kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan.

Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara kongkrit sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Balikpapan menerapkan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Beriman
2. Meningkatkan Investasi, memperkokoh ekspektasi dunia usaha dan memperluas lapangan kerja
3. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Ketiga misi ini dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2011 sampai dengan 2015) yang didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan guna merealisasikan misi.

Untuk merealisasikan misi ini ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2011 sampai dengan 2015) sebagai berikut :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat	Masyarakat yang cerdas dan terampil
2	Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah
3	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya reformasi dan birokrasi

SASARAN DALAM RENSTRA	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Peningkatan kemampuan teknis aparatur pengelola keuangan dan aset daerah
2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan	2. Peningkatan pengeloladan evaluasi keuangan perbendaharaan
3. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	3. Prosentase pembinaan dan monitoring laporan keuangan SKPD
4. Meningkatnya sumber pembiayaan daerah dari pihak ketiga	4. Jumlah pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi
5. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan	5. Prosentase proses pembuatan
6. Meningkatnya kapasitas/kemampuan sumber daya	

<p>aparatur</p> <p>7. Terbentuknya strukturkelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif</p>	<p>RKA dan DPA</p> <p>6. Prosesntase laporan keuangan tepat waktu</p> <p>7. Prosentase penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu</p> <p>8. Prosentase penguji dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah</p> <p>9. Prosentase daftar kebutuhan barang milik daerah</p> <p>10. Tersedianya standarisasi barang milik daerah</p> <p>11. Jumlah pengamanan aset daerah kota Balikpapan</p> <p>12. Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah</p> <p>13. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset</p> <p>14. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>15. Prosentase pemeliharaan dan</p>
--	---

	pengembangan aplikasi gaji
--	----------------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2014.

Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan daerah.	45 orang	55 orang	122.30

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan bimbingan teknis kepada 55 orang pegawai dari 45 orang yang ditargetkan. Ini berarti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam melaksanakan bimbingan teknis kepada pegawai.

Sebagai perbandingan untuk tahun 2013 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan melaksanakan bimbingan kepada pegawai sebanyak 32 orang dan untuk tahun 2014 melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 55 orang. Tahun 2014 terdapat peningkatan $\pm 40\%$ dari yang telah ditargetkan.

Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan.	67 SKPD	67 SKPD	100

BPKAD telah 100 % melaksanakan pengelolaan dan mengevaluasi keuangan SKPD yang ada di Balikpapan sebanyak 67 SKPD dan semuanya sudah dievaluasi dan dikelola dengan baik ini ditandai dengan semakin baiknya laporan keuangan BPKAD Kota Balikpapan. Dibandingkan dengan tahun 2013 telah terjadi peningkatan sebanyak ± 11 % yaitu dari 60 SKPD yang dikelola menjadi 67 SKPD.

Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase Pembinaan dan Monitoring Laporan Keuangan SKPD	67 SKPD	67 SKPD	100

Dalam melakukan pembinaan dan monitoring laporan keuangan BPKAD telah melaksanakan sebanyak 67 SKPD yang ada di Balikpapan sesuai dengan yang diharapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebanyak ± 11 %, dari 60 SKPD menjadi 67 SKPD yang masuk dalam pembinaan dan monitoring laporan keuangan ini disebabkan karena adanya pemekaran beberapa wilayah yang ada di Balikpapan.

Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Pemahaman Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Regulasi dan aplikasi	67 SKPD	67 SKPD	100

Pemahaman bendahara dalam pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan aplikasi tahun 2014 terlaksana 100 persen. Dari 67 SKPD yang ada di Balikpapan semuanya sudah memahami cara menyajikan laporan keuangan secara aplikasi karena semua bendaharawan setiap tahun diberikan kursus/bimbingan teknis dalam menyajikan laporan keuangan sehingga wawasan dan pengetahuan bendaharawan setiap SKPD sudah memahami betul apa yang harus di sajikan dalam laporan keuangan setiap bulan/triwulan/semester/tahunan.

Dibandingkan dengan tahun 2013 yang lalu telah terjadi peningkatan sebanyak 7 SKPD yaitu dari 60 SKPD menjadi 67 SKPD bendaharanya yang sudah memahami pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase proses pembuatan RKA dan DPA	67 SKPD	67 SKPD	100

Proses pembuatan RKA dan DPA untuk tahun 2015 semakin baik dan terkoordinasi karena dipusatkan di satu tempat dan bukan di setiap SKPD yang terlibat jadi tidak terpecah-pecah sehingga mudah berkoordinasi bila terjadi

kesalahan. Tahun 2014 proses pembuatan RKA dan DPA telah tuntas dilaksanakan 100 persen yaitu sebanyak 67 SKPD yang ditargetkan sudah semuanya membuat RKA dan DPA.

Dibandingkan tahun 2013 proses pembuatan RKA dan DPA SKPD belum sebaik tahun 2014 karena proses pembuat RKA dan DPA SKPD belum terpusat di satu tempat dan hanya sebanyak 60 SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	67 SKPD	67 SKPD	100

Dengan semakin baiknya sistem keuangan yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan menunjang setiap SKPD dalam menyajikan pembuatan laporan keuangannya tepat waktu. Dari 67 SKPD yang ada hampir semua SKPD sudah menyajikan laporan keuangannya tepat waktu.

Dibandingkan tahun 2013 penyajian laporan keuangan tepat waktu hanya 60 SKPD yang melaksanakan penyajian laporan tepat waktu dan tahun 2014 ini bertambah menjadi 67 SKPD yang menyajikan laporan keuangannya tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah pusat walaupun masih ada hambatannya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase Penyusunan Nota Keuangan dan Nota	67 SKPD	67 SKPD	100

Kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD sampai Penetapan Raperda APBD Tepat Waktu.			
--	--	--	--

Dalam proses penyusunan nota keuangan dan nota kesepatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih banyak kendala-kendala yang harus dilalui tetapi 67 SKPD sudah menyelesaikan penyusunan nota keuangan dan DPRD sudah menetapkan Raperda APBD tahun 2014 tepat pada waktu yang ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah	67 SKPD	67 SKPD	100

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melakukan pengujian dokumen SPJ yang masuk sebanyak 67 SKPD di tahun 2014, ini berarti sudah terlaksana 100 persen atas target yang telah ditetapkan sebanyak 67 SKPD. Pengujian dokumen atau verifikasi SPJ ini dilakukan untuk memperkecil kesalahan dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan SKPD.

Pada tahun 2013 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan melaksanakan pengujian dokumen atau verifikasi SPJ sebanyak 60 SKPD.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	67 SKPD	67 SKPD	100

Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan pendataan barang milik daerah yang ada di 67 SKPD dan untuk menunjang kebutuhan barang disetiap tahunnya SKPD diharuskan membuat daftar kebutuhan barang milik daerah guna menunjang kelancaran kerjanya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya SKPD yang membuat daftar kebutuhan barang milik daerah hanya 60 SKPD ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Tersedianya Standarisasi Barang Milik Daerah	180 Buku	180 Buku	100

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan standarisasi barang milik daerah ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi harga dari masing-masing SKPD yang ada di Balikpapan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan standarisasi barang milik daerah dengan menerbitkan

buku sebanyak 180 sesuai dengan yang sudah ditargetkan pada waktu penyusunan anggaran tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 lalu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan menerbitkan buku standarisasi barang milik daerah sebanyak 180 buku. Penerbitan buku standarisasi barang milik daerah tahun 2013 dan 2014 sama tidak ada perubahan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Pengamanan Aset Daerah Kota Balikpapan	10 Dokumen	10 Dokumen	100

Aset/barang milik daerah harus diamankan dan dijaga supaya keberadaannya tidak berpindah tangan atau hilang dan untuk mengamankan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan mengadakan kegiatan tentang pengamanan aset daerah berupa penerbitan dokumen sebanyak 10 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu 10 dokumen. Jadi kegiatan pengamanan aset daerah kota Balikpapan sudah 100 persen terlaksana.

Kegiatan pengamanan aset daerah kota Balikpapan pada tahun 2013 dan tahun 2014 sama terlaksana 100 persen yaitu dengan penerbitan dokumen pengamanan aset daerah sebanyak 10 dokumen.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Tersedianya Inventarisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	67 SKPD	67 SKPD	100

Inventarisasi pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Perdawali 47 Tahun 2012 tentang uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan maka sesuai dengan fungsinya BPKAD menginventarisasi barang milik daerah sebanyak 67 SKPD yang ada di Balikpapan. Dengan adanya kegiatan ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan mempunyai daftar inventaris barang milik daerah seluruh SKPD yang ada di Balikpapan dan sudah terlaksana keseluruhannya.

Pada tahun 2013 kegiatan inventarisasi pengelolaan barang milik daerah juga sudah dilaksanakan 100 persen yaitu sebanyak 60 SKPD yang ada. Terdapat kenaikan sebanyak ± 11 % menjadi 67 SKPD

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset	67 SKPD	67 SKPD	100

Tahun 2014 kegiatan pemeliharaan rutin berkala aset pada 67 SKPD yang ada sudah dilaksanakan dan ini bertujuan untuk memperpanjang usia pakai aset yang ada baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kegiatan ini sangat

berguna sekali karena sangat menunjang kelancaran tugas masing-masing SKPD yang ada.

Pada tahun 2013 kegiatan pemeliharaan rutin berkala aset hanya 60 SKPD sedangkan tahun 2014 kegiatan pemeliharaan rutin berkala aset mencakup 67 SKPD yang ada.

Sasaran 4 : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	67 SKPD	67 SKPD	100

Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sudah dilaksanakan oleh 67 SKPD yang ada di Balikpapan. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi diharapkan penyajian laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan akan semakin baik, cepat dan tepat dan dapat dipublikasikan ke masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan mengoptimalkan pemanfaat teknologi informasi yang sudah ada dengan mengadakan pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2013 yang lalu indikator penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ini hanya mencakup 60 SKPD yang ada, dan dengan adanya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan di tahun 2014 ini indikator penyusunan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencakup 67 SKPD.

Sasaran 4 : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Prosentase Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji	67 SKPD	67 SKPD	100

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji sudah dilaksanakan 100 persen yaitu 67 SKPD yang ada, ini sangat diperlukan karena dengan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji diharapkan gaji pegawai Pemerintahan Kota Balikpapan akan semakin baik, cepat dan tepat. Dengan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji ini dapat memperlancar serta membantu meningkatkan pengelola gaji dalam proses penggajian pegawai untuk menghindari terjadinya kesalahan/kekeliruan.

Disamping itu dengan adanya perubahan data pegawai disetiap periode memerlukan perhatian khusus. Dengan peningkatan sistem aplikasi gaji tentu akan diharapkan dapat tetap terjaga pemutahiran data dimaksud.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan Program kegiatan yang dilaksanakan dimulai dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Akuntabilitas Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014

Pencapaian Akuntabilitas Keuangan per sasaran sebagai berikut yaitu :

NO	SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkat dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD	Rp 9,431,034,300.00	Rp 7,219,892,695.00	76.55
2	Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan	Rp 2,425,056,800.00	Rp 1,812,533,553.00	74.74
3	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan	Rp 4,889,065,400.00	Rp 3,147,582,424.00	64.38
4	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik	Rp 1,537,560,000.00	Rp 990,179,326.00	64.40

Pencapaian akuntabilitas keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan belum bisa terealisasi 100 persen dikarenakan :

1. Adanya penghematan
2. Adanya negoisasi
3. Adanya kegiatan yang tidak terealisasi
4. Adanya perubahan kebijakan pimpinan

Sebab-sebab yang telah disebutkan ini sangat mempengaruhi realisasi anggaran yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Pada tahun 2013 pencapaian akuntabilitas keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan menurut sasaran bila dirata-rata

hanya mencapai sekitar 55.85 persen dan untuk tahun 2014 pencapaian akuntabilitas keuangan menurut sasaran rata-rata mencapai 70.85 persen.

Target akuntabilitas keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan tahun 2014 sebesar Rp. 18.282.716.500,- dan hanya terealisasi sebesar Rp. 13.170.187.998,- atau sekitar 70.02 persen dari target sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2013 target sebesar Rp. 11.290.334.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.856.777.500,- atau sekitar 55.85 persen.

Dengan adanya peningkatan baik dilihat dari jumlah anggaran maupun prosentase fisik diharapkan akan semakin baik juga kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014, dan implementasinya disesuaikan dengan arahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016.

LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2014 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula Penanganan dalam memverifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis.

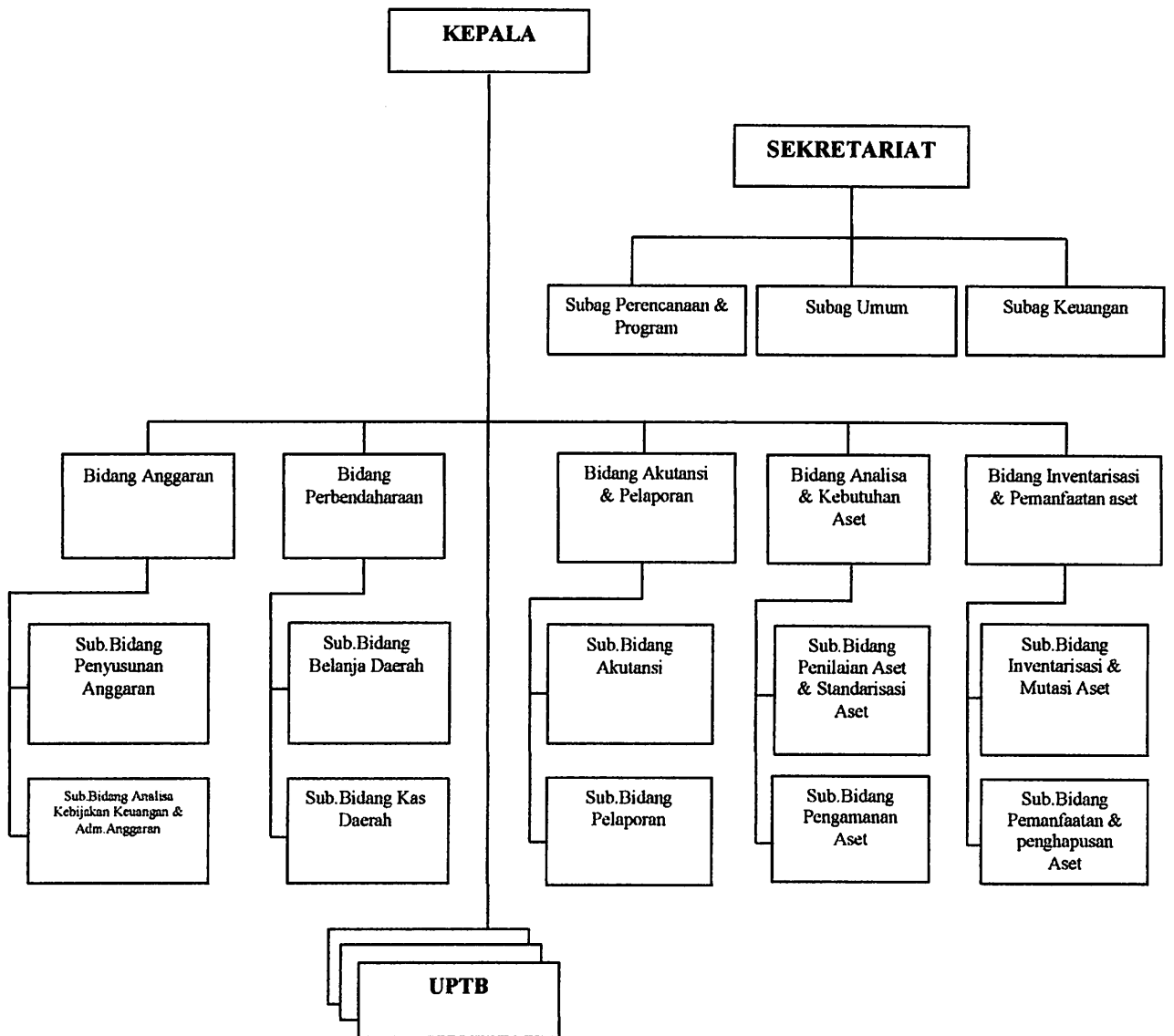
Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang.
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan.
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kota Balikpapan.

Dengan tersusun LAKIP Tahun 2014 diharapkan dapat tercapainya memacu pelaksanaan Good Governance sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran SKPD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2014 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula mengenai verifikasi terhadap Indikator Output dan Outcomes dari masing-masing Indikator Kinerja telah mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis

Bagan Struktur Organisasi



PENETAPAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkat dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD	1. Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan dan aset daerah	5 kali	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Peningkatan kemampuan teknis aparat BPKAD - Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota	Rp. 300.000.000,-
	2. Jumlah peningkatan pengelolaan & evaluasi keuangan perbendaharaan	68 SKPD		Rp. 600.000.000,-
	3. Prosentase pembinaan dan monitoring laporan keuangan SKPD	68 SKPD	Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan Daerah - Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi keuangan Perbendaharaan - Kompilasi Evaluasi dan Entry Data RKA dan DPA - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah - Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD	Rp. 816.000.000,-
	4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan Aplikasi	68 SKPD		Rp. 100.000.000,-
	5. Prosentase Proses Pembuatan RKA dan DPA	68 SKPD		Rp. 269.475.000,- Rp. 450.000.000,-
Meningkatnya Administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Laporan keuangan tepat waktu	68 SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan - Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat	Rp. 232.280.000,-

Penetapan kinerja 2015

	2. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu	68 SKPD	Daerah - Pembinaan dan Evaluasi Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD - Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp. 338.350.000,- Rp. 1.712.095.000,-
	3. Prosentase penguji dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah	68 SKPD	Pengembangan Sistem Pelaporan - Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan Daerah - PEnyusunan Analisa Standar Biaya - Penyusunan Standarisasi Satuan Harga - Penyusunan Regulasi-regulasi Pengelolaan Keuangan - Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD - Penyusunan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit - Pengelolaan Administrasi Kas daerah	Rp. 535.000.000,- Rp. 460.000.000,- Rp. 275.000.000,- Rp. 795.000.000,- Rp. 549.975.000,- Rp. 2.471.000.000,- Rp. 458.000.000,- Rp. 375.000.000,- Rp. 279.000.000,-
Meningkatnya pengelolaan aset daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Daftar Kebutuhan barang milik daerah 2. Tersedianya standarisasi barang milik daerah 3. Jumlah Pengamanan aset Daerah kota Balikpapan	68 SKPD 1 Dokumen 68 SKPD	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah - Pengamanan aset pemerintah kota Balikpapan - Penilai aset/appraisal pemerintah kota Balikpapan - Pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah - Penatausahaan pengelolaan barang milik daerah	Rp. 800.000.000,- Rp. 180.000.000,- Rp. 1.522.477.000,- Rp. 950.500.000,-

Penetapan kinerja 2015

	4. Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah		- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 503.000.000,-
	5. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset		- Pengamanan aset pemerintah kota dengan kejaksaan	Rp. 100.000.000,-
			- Pemutakhiran Data Aset Tidak Bergerak Pemerintah Kota Balikpapan	Rp. 125.000.000,-
			- Kajian Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Rp. 250.000.000,-
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	1. Penyusunan Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	68 SKPD	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
			- Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 480.000.000,-
	2. Prosetase Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi gaji	68 SKPD	- Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi gaji	Rp. 190.000.000,-
			- Dokumentasi Data Keuangan dan Aset secara Elektronik	Rp. 100.000.000,-
			- Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 300.000.000,-
			- Pengelolaan Website BPKAD	
			Program Peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan Daerah	Rp. 25.000.000,-
			- Penghimpun Data & Pembuat Daftar Gaji PNS SKPD	Rp. 486.000.000,-

Jumlah Anggaran Rp. 21.318.976.000,-

Program. Rp. 14.469.152.000,-

Walikota Balikpapan

H.M.RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 15 Januari 2015

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Drs.H. MADRAM MUCHYAR

Nip. 19611013 199503 1 001

PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET	REALISASI	%				
Meningkat dan berkembangnya Kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD	1. Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan dan aset daerah	45 orang	55orang	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur - Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan aset daerah - Peningkatan kapasitas manajemen Tim asistensi APBD kota	484.500.000	452.156.200	93.32
	2. Jumlah peningkatan pengelolaan & evaluasi keuangan perbendaharaan	67 SKPD	67 SKPD	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah	604.225.000	523.369.118	86.62
	3. Prosentase pembinaan dan monitoring laporan keuangan SKPD	67 SKPD	67 SKPD	100	- Bimbingan teknis implementasi paket regulasi - Kompilasi Evaluasi dan Entry Data RKA	500.000.000 94.990.000	359.255.000 78.185.000	71.85 82.31
	4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan Aplikasi	67 SKPD	67 SKPD	100	- Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah - Pengelolaan Penatausahaan Belanja Daerah - Bimbingan Teknis Pengelola keuangan daerah - Sosialisasi Penyusunan RKA dan DPA	5.531.681.000 606.000.000 530.000.000 266.167.000	4.220.616.997 522.865.900 397.896.800 249.333.000	68,20 86.28 75.07 93.68
	5. Prosentase Proses pembuatan RKA dan DPA	67 SKPD	67 SKPD	100	- Penyusunan regulasi-regulasi pengelola keuangan daerah - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit - Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	454.202.300 80.269.000 279.000.000	149.894.780 61.932.500 204.387.400	33.00 77.16 73.26

Pengukuran Kinerja 2014

Meningkatnya Administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD kota Balikpapan	1. Prosentase Laporan keuangan tepat waktu	67 SKPD	67 SKPD	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	2. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu	69 SKPD	69 SKPD	100	- Pengujian Dokumen SPJ Satuan Perangkat Daerah	177.000.000	95.623.120	54.02
					- Pembinaan dan Evaluasi Penatusahaan Pertanggungjawaban keuangan SKPD	279.000.000	231.041.840	82.81
					- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan	820.000.000	776.332.300	94.67
	3. Prosentase penguji dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah	67 SKPD	67 SKPD	100	Pengembangan Sistem Pelaporan			
					- Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	606.890.000	427.644.000	70.46
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.			
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD					185.006.800	126.465.558	68.36	
				- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	91.925.000	52.574.235	57.09	
				- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan APBD	191.560.000	63.667.500	33.24	
				- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	73.675.000	39.185.000	82.31	

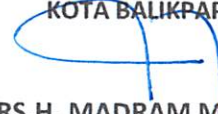
Pengukuran Kinerja 2014

Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan	1. Prosentase Daftar Kebutuhan barang milik daerah	67 SKPD	60 SKPD	100	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah - Penyusunan Aset Pemerintah Kota Balikpapan - Penilai aset/appraisal pemerintah Kota Balikpapan - Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Sistem Informasi Pemetaan Data Aset Tidak Bergerak - Sistem Informasi Pemetaan data Aset Tidak Bergerak Pemerintah Kota Balikpapan - Pembinaan dan Peningkatan kapasitas pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengamanan Aset Pemerintah Kota dengan Kejaksanaan Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah - Penyusunan Analisa Standart Biaya - Penyusunan Standar Satuan Harga	564.000.000	509.876.960	90.40
	2. Tersedianya standarisasi barang milik daerah	180 buku	180 Buku	100		379.523.000	371.795.000	97.96
	3. Jumlah Pengamanan aset daerah kota Balikpapan	10 dokumen	10 dokumen	100		2.146.352.000	1.104.561.150	51.46
	4. Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah	67 SKPD	67 SKPD	100		600.000.000	327.228.662	54.54
	5. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset					100.000.000	89.100.000	89.10
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang	1. Penyusunan Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	67 SKPD	67 SKPD	100	223.119.000	215.919.000	96.77	
	2. Prosetase Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi gaji	67 SKPD	67 SKPD	100	215.000.000	140.842.000	65.51	
					150.375.000	45.325.000	30.14	
					1.800.000.000	557.984.200	31,00	
					339.526.400	206.664.652	60.87	
					171.170.000	136.270.000	79.61	
					735.000.000	528.716.726	71.93	
					180.000.000	133.899.200	74.39	

Pengukuran Kinerja 2014

beroritasi pada kepentingan publik					Program Peningkatan dan pengembangan Pengelola Keuangan Daerah			
					- Penghimpun Data & Pembuat Daftar gaji PNS SKPD	469.560.000	327.563.400	69.76
					- Sosialisasi Penatausahaan Barang Habis Pakai SKPD	153.000.000	-	0

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BALIKPAPAN


DRS.H. MADRAM MUCHYAR
Nip. 19611013 199503 1 001